

ABSTRAK

Penulisan Legal Memorandum ini berdasarkan Laporan Informasi nomor : R/LI-81/XII/Paminal tanggal 13 Desember 2019 tentang viralnya video pemukulan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri. Pada dua video tersebut tampak seseorang yang diduga anggota Polri melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan dengan benda tumpul (tongkat), tendangan, pukulan tangan kosong pada bagian wajah, punggung, dan bagian tangan korban yang diduga warga Tamansari atau anggota kelompok solidaritas warga. Permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan legal memorandum ini adalah, bagaimanakah tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dalmas pada pengamanan penertiban kawasan Tamansari menurut KUHP dan Tindakan hukum lain apakah yang dapat dilakukan Paminal Polda Jawa Barat terhadap pelaku kekerasan pada pengamanan penertiban kawasan Tamansari Bandung.

Metode penulisan menggunakan pendekatan hukum normative, yaitu mengacu pada studi kepustakaan yang ada. Dalam penulisan ini juga dipergunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dimana pendekatan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan kasus hukum yang sedang diteliti.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dikemukakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dalmas pada pengamanan penertiban kawasan Tamansari menurut KUHP pada dasarnya dapat memenuhi rumusan Pasal 170 ayat (2) ke 1 dan atau Pasal 351 ayat (1) KUHP Agar proses hukum terhadap pelaku penganiayaan tersebut dapat dilakukan masih diperlukan adanya pelaporan atau pengaduan dari korban kekerasan yang disertai bukti-bukti berupa akibat yang ditimbulkan yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut. Berkaitan dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan Sub Paminal Bid Propam Polda Jabar adalah antara lain dengan mengembalikan anggota yang melakukan kekerasan kepada atasannya atau ankum.

Abstract

This Legal Memorandum is based on Information Report No: R / LI-81 / XII // Paminal on 13 December 2019 regarding the viral video of violences committed by members of Police. In the two videos, it appears that someone suspected of being a member of Police committed acts of violences that were allegedly residents of Tamansari or members of the community solidarity group. Legal issues raised in the writing of this legal memorandum are, how do acts of violence perpetrated by Dalmas members in securing the arrangement of the Tamansari area according to the Criminal Code and what other legal actions can be carried out by West Java Regional Police for the perpetrators of violence in securing the arrangement of the Tamansari area in Bandung.

This writing method is using normative law research that relies on the existing literature study. In this study also use the legislation approach (statute approach), where the approach is done by examining the laws and regulations relevant to the case that are being investigated,

The results of this paper can be summarized as follows, the acts of violence by police members in securing the arrangement city of the Tamansari area according to the Criminal Code can basically fulfill the formulation of Article 170 paragraph (2) to 1 and or Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code In order that legal proceedings against the perpetrators of the persecution can still be required reporting or complaints from victims of violence accompanied by evidence in the form of the consequences arising from the persecution. Related to legal actions that can be implemented by Sub bid Propam, by returning members who committed violence to their commander.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Alalh SWT sebagai ungkapan syukur, karena penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Legal Memorandum berjudul, **TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PAMINAL POLDA JAWA BARAT TERHADAP ANGGOTA DALMAS POLRESTABES BANDUNG YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN PADA PENGAMANAN PENERTIBAN KAWASAN TAMANSARI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 Jo. 170 KUHP (Laporan Informasi Nomor : R/LI-81/XII//Paminal tanggal 13 Desember 2019)**

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada Dini Ramdania, S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan yang berarti selama proses penyusunan Legal Memorandum ini, hingga akhirnya dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (Pur.) Dr. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M. Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi sekaligus Wali Dosen
7. Para Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Pimpinan dan Staf Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Langlangbuana
10. Seluruh Rekan dan Sahabat Mahasiswa Kelas B1 angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, kakak dan calon istri yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Akhir kata penulis berharap tugas akhir berupa Legal Memorandum ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pembacanya terutama bagi penulis pribadi, atau rekan mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu hukum, instansi terkait maupun khalayak lain pada umumnya yang memiliki ketertarikan pada ilmu hukum.

Bandung, Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSRRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM	1
A. Kasus Posisi.....	1
B. Permasalahan Hukum	5
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN.....	6
A. Pasal 170 dan 351 KUHP	6
B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	7
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	7
D. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	8
E. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa	9
F. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.....	9
G. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	10
BAB III TINJAUAN TEORITIK	12
A. Peran dan Tugas Pokok Polri	12

B. Pengertian Kekerasan dan Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP	17
C. Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana.....	24
D. Kewenangan Paminal dalam Penyelidikan Tindak kekerasan oleh Anggota Dalmas.....	29

BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Dalmas Pada Pengamanan Penertiban Kawasan Tamansari Menurut KUHP.....	31
B. Tindakan Hukum Lain Yang Dapat Dilakukan Paminal Polda Jawa Barat Terhadap Pelaku Kekerasan pada Pengamanan Penertiban Kawasan Tamansari Bandung	35

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	40
B. Rekomendasi.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP